BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”. Dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai terjemahan dari *Straffbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti berikut:¹

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Diantara keenam istilah di atas, Menurut Prof. Sudarto bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah Tindak Pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah Tindak Pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo Karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah Tindak Pidana sehingga istilah Tindak Pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda dapat diterjemahkan dengan “*Strafbaarfeit*”, yang secara teoritis

---

¹Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016, 136.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 49.

merupakan kreasi dari pada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.⁷⁷ Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinonimkan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum *Delik*, “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*” dengan demikian delik adalah perbuatan pidana, dalam hal ini perbuatan pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Delik *Formal* adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undan-Undang yang bersangkutan. Contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan), dan pasal 209-210 (penyuapan).⁷⁸
- 2) Delik *Materil* adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contohnya adalah pasal 338 (Pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya.
- 3) Delik *Dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Contohnya adalah pasal-pasal 162,193,310,338.
- 4) Delik *Culpa* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja karena unsure kealpaannya. Contoh adalah pasal 359, 360, 195.
- 5) Delik *Aduan* adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis *Delik*, yaitu *Delik Aduan Absolute* : yang penuntutannya hanya berdasarkan

---

⁷⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang:Setara Press, 2016, 58.

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 47.

pengaduan, dan *Delik Aduan Relatif* : karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 dan 3).⁷⁹

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.
- c. R.Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- d. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah : “Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een terokeningsvatbaar person”. Terjemahan bebasnya : Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁸⁰

2. Jenis Pidana

Menurut Pasal 10 *Wetbiej Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh

---

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 61.

⁸⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 136.

wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya singkat KUHP), jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Kurungan;
  - d. Denda.
  - e. Pidana Tambahan
- 2) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 3) Pertampasan barang-barang tertentu;
- 4) Pengumuman putusan hakim.⁸¹

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaannya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa pidana penjara diancam terhadap kejahatan-kejahatan culpa, dan pelanggaran fisik.

---

⁸¹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2014, 243.

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dari pada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sengaja sebagaimana yang telah diatur dalam buku II KUHP Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekalim seperti dalam buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.⁸²

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga Negara yang memang layak untuk dihormati dengan menjadikan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknyanya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau untuk dijual untuk Negara. Pengumuman putusan hakim menurut pasal 43 KUHP adalah sebenarnya semuanya putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum

---

⁸² Java Kreativiti, *Jenis-jenis Pidana & Penjelasannya*, <http://telinga.semud.blogspot.com> diakses pada 7 Mei 2020 Pukul 21.54 WIB

yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.⁸³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.⁸⁴

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,

---

⁸³ Java Kreativiti, *Jenis-jenis Pidana & Penjelasannya*, <http://telinga.semud.blogspot.com> diakses pada 7 Mei 2020 Pukul 22.00 WIB

⁸⁴ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, 137.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorvedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan-kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.⁸⁵

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu:

1. Adanya niat.
2. Perbuatan yang sudah dilakukan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian.
5. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi pidana.

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Berbicara soal kesalahan berarti berbicara tentang Pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini

---

⁸⁵Lamintang dan Fransiscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, 192.

menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsure-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan dendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁸⁶

Istilah *Schuld* yang kebanyakan dipakai oleh para sarjana, diterjemahkan sebagai kesalahan. Satochid, menegaskan bahwa istilah *Schuld* yang diterjemahkan sebagai kesalahan sebenarnya kurang tepat, oleh karena, kata “salah” itu berarti tidak benar, Satochid mencontohkan $2 \times 2 = 5$. Artinya perbuatan salah berarti perbuatan yang tidak benar. Dalam hukum pidana “kesalahan” itu, mengandung arti yang lebih luas, yakni mengandung pengertian bahwa seseorang itu dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Untuk menghilangkan kekacauan dalam berpikir, maka Satochid menganjurkan agar tetap memakai istilah *Schuld* saja. Walaupun sebenarnya perkataan *schuld* itu pun dalam bahasa Belanda mempunyai banyak arti. Pada umumnya, telah diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus ada anasir yang sebenarnya harus dipenuhi yaitu:

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan melawan hukum (UU)
- b. Seorang pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuannya (*schuld/kesalahan*).⁸⁷

Doktrin juga membuat perincian tentang *Strafuitsluitingsgronden* (Alasan-Alasan Penghapusan Pidana) yaitu dalam hal-hal berikut:

1. Alasan Pembenaar (Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 (1))
  - a. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) : “Tidak dipidana, Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,

---

⁸⁶Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 205.

⁸⁷Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 208.

karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Pasal 49 ayat (1) memberikan syarat pokok yakni: Harus ada serangan dan diperlukan pembelaan, dua syarat tersebut dapat diperincikan yaitu Pertama, serangan (anval) itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum. Kedua, pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal, imbang dan pembelaan itu untuk membela dari serangan yang ditujukan kepada tubuh (badan), kesusahaan dan barang.⁸⁸ Contoh seseorang A hendak memukul B dengan tongkat. Dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang melawan hukum dan langsung mengancam. Pembelaan yang dapat dilakukan B adalah bermacam-macam. B dapat menembak A akan tetapi apabila B masih dapat memukul A untuk menghindari diri dari serangan A maka Pembelaan yang dilakukan oleh B dengan cara menembak bukanlah pembelaan terpaksa.

b. Menjalankan Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift*)

Pasal 50 berbunyi: *“Tidak boleh dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perundang-undangan”*

Dalam arti formil “Peraturan perundang-undangan” yakni peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (dalam UUD 45, Undang-undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR) kemudian diperluas dengan arti material yakni segala peraturan umum. Jadi termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemda dan sebagainya. Adapun tentang arti kata : *“Menjalankan”* bahwa menjalankan perundang-undangan itu tidak hanya berarti menjalankan suatu kewajiban/tugas, tetapi juga menjalankan kekuasaan/wewenang.⁸⁹

c. Menjalankan Perintah Jabatan (*Ambtelijke Bavel*)

Pasal 51 ayat (1) berbunyi: *“Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yangn diberikan oleh kuasa yang berhak”*

---

⁸⁸Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 253.

⁸⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 242.

Contoh, Menjalankan Perintah Jabatan: seorang anggota polisi diperintah komandannya menangkap dan menahan seseorang. Menahan dan menangkap orang itu sebenarnya merupakan kejahatan, tetapi karena perbuatan itu dilakukan atas perintah jabatan, ia tidak dapat dipidana. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah harus suatu hubungan menurut hukum publik. Jadi, bila komandan polisi memerintahkan pembantu rumah tangganya untuk menangkap orang, maka tidak dibenarkan. Akan tetapi, baik perintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri, "*ambtelijk*" itu hanya berarti suatu hubungan menurut hukum public. Jadi tidak perlu bahwa yang diperintah harus dibawah jabatan yang memerintah. Misalnya walikota memerintahkan seorang polantas menahan sebuah kendaraan atau perintah yang diberikan jaksa kepada polisi dan sebagainya karena sesuai dengan perintah jabatannya.⁹⁰

2. Alasan Pemaaf (Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, ayat 2 dan Pasal 51 ayat 2)

a. Tidak mampu Bertanggungjawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*)

Pasal 44 berbunyi: "*Tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan*".

Menurut Pasal 44 ini, maka syarat-syaratnya ialah:

- a) Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
- b) Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

KUHP tidak menentukan kapan seorang itu dianggap punya jiwa yang sehat MvT menjelaskan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, apabila:

- a) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.

---

⁹⁰Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 243.

- b) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- c) Ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.⁹¹

b. Daya Paksa (*Overmacht*)

Pasal 48 berbunyi: “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”

Daya yang memaksa itu merupakan psikis, terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri atau merupakan paksaan psikis dalam batin terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya namun daya itu adalah demikian besarnya sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan *vis absoluta*, sedangkan kekuatan psikis dinamakan *vis compulsiva* karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga. Contoh *Overmacht* misalnya, A mengancam B menampar C. Kalau tidak dia akan ditikam. Dalam hal ini B dihadapkan pada pilihan yang melindungi kepentingan C atau kepentingan sendiri, walaupun kepentingan orang lain jadi korban. Dalam hal ini perbuatan B itu dapat dimaafkan.⁹²

c. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam bahasa Belanda dinamakan *Noodweer-ekses* tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum. Tetapi reaksinya keterlaluhan, tidak esimbang lagi dengan sifat serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksesnya tadi “*langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat*”, sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal ini menye-

⁹¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 231.

⁹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2018, 151.

babkan adanya alasan pemaaf.⁹³

d. Menjalankan Perintah Jabatan (*Ambtelijke Bevel*)

Pasal 51 ayat (2) berbunyi: “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama oleh Bupati/Walikota. Perda yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah dalam arti luas dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan⁹⁴. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya peraturan daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah⁹⁵. Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu. Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain :

---

⁹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 161.

⁹⁴ Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004, 36.

⁹⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005, 131.

- a. Memihak kepada rakyat banyak;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya;

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.⁹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat 1 jenis dan hieraki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.⁹⁷

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan ladsan konsitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu :

---

⁹⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, 133.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁹⁸

3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk menghasilkan sebuah produk peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan tuntunan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkordinasi. Dalam pembuatan peraturan daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain: dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah, adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

---

⁹⁸ Departemen Hukum dan Ham RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah edisi kelima*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Tahun 2011, 8.

Pembentukan peraturan daerah merupakan proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemberlakuan⁹⁹. Untuk itu sebelum merumuskan suatu peraturan daerah terdapat tiga dasar atau landasan pembentukan peraturan daerah :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Landasasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan ini menyangkut tentang persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan

---

⁹⁹ Muhammad Suharjono, *Pembentukan peraturan daerah yang responsive untuk mendukung otonomi daerah*, Jurnal Ilmu Hukum vol 10 No 19, Februari 2014, 32.

hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁰⁰

Adapun lingkup wewenang membentuk perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tentang tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat.¹⁰¹

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Prinsip-prinsip pembentukan perda ditentukan sebagai berikut :

Pada Bab IX Perda dan Perkada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 1 Umum, dijelaskan :

- 1) Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan perda.
- 4) Pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan :

---

¹⁰⁰Departemen Hukum dan Ham RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah edisi kelima*, 15.

¹⁰¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi UII, Yogyakarta, 2001, 72.

- 1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Denda administratif, dan/atau;
  - g. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Pada Paragraf kedua Perencanaan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan :

- 1) Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda
- 2) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu satu (1) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- 3) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- 4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- 5) Dalam program pembentukan perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas :
  - a. Akibat putusan Mahkamah Agung, dan
  - b. APBD

---

¹⁰² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam program pembentukan perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. Penataan Kecamatan; dan
  - b. Penataan Desa¹⁰³.

4. Asas-asas Peraturan Daerah

Dalam pembentukan perda, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat agar perda tersebut memberikan hal positif bagi masyarakat daerah. Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat. Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis yang berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.¹⁰⁴

Materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat dengan diberlakukannya perda ini menyebarkan perasaan khawatir dan ketakutan di kalangan masyarakat khususnya perempuan yang memiliki aktivitas ataupun pekerjaan di luar rumah, khususnya pada malam hari.
- b. Asas kemanusiaan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

---

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰⁴ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Jakarta:Refika Aditama, 2007, 46-47.

- c. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
- e. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.¹⁰⁵

Selain asas di atas, DPRD dan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan peraturan daerah harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”¹⁰⁶. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang dagangannya di tempat umum atau hal layak ramai, pedagang kaki lima dapat kita temui dengan mudah diberbagai kota yang ada di indonesia, baik itu disepanjang jalan, trotoar maupun tempat umum lainnya,

---

¹⁰⁵ Cholida Hanum, *Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan dan Asas-asa Materi Muatan Peraturan Daerah*, e-Journal vol 7 No 1, 2017, 55.

¹⁰⁶ Permendagri No 41 tahun 2012

Aris ananta mengemukakan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa yang modalnya relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.⁵¹

Sedangkan bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima yaitu⁵², pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar), artinya dalam ruang lingkup yang sangat umum serta mudah dipahami oleh masyarakat awam, PKL ini merupakan orang-orang yang golongan ekonomi kebawah yang sering berjualan di emperan toko ditepi jalan ataupun jalan-jalan umum dan tempat wisata pada umumnya, yang biasanya sangat mudah untuk ditemui diberbagai penjuru negeri termasuklah di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Kota Palembang.

Istilah pedagang kaki lima ini, telah ada sejak zaman Rafles yang berasal dari istilah *Five Feet* yang memiliki arti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Lain halnya di Amerika Pedagang semacam ini biasa dikenal dengan sebutan *Hawkers* yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar⁵³.

Menurut pandangan Pieter Karafir menjelaskan bahwa “Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti jalan, taman-taman, emperan toko, dan pasar tanpa izin usaha dari pemerintah”⁵⁴. Hal inilah yang menjadikan pedagang kaki lima tersebar dengan mudahnya di seantero negeri ini, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota.

---

⁵¹ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*, 11

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

⁵³ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*, Jakarta:Indo Camp, 2018, 11.

⁵⁴ Faried Ali dan Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung:Refika Aditama, 2012, 186.

Bila merujuk pada definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diartikan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha, pasar tanpa izin usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

2. Ciri-Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima tersebar dipenjuru negeri, bahkan mereka mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga masyarakat dengan mudahnya mengenali PKL dan yang bukan PKL, cara mengenalinya pun beragam ada ciri-ciri dan karakteristik tersendiri, adapun ciri-ciri dan karakteristiknya sebagai berikut:

Ada beberapa ciri-ciri dari pedagang kaki lima yaitu:⁵⁵

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik.
- b. Tidak memiliki surat izin usaha
- c. Tidak teratur dalam kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
- d. Bergerombol di trotoa, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen,

Tidak jauh berbeda dengan ciri-cirinya, PKL juga memiliki karakteristik yang dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik PKL, sebagaimana yang dikemukakan oleh Simanjuntak yaitu dijabarkan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan

---

⁵⁵ Buchari Alam, *Kewirausahaan*, Bandung:Alfabeta, 2009, 157.

⁵⁶ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*, 12.

pendapatan yang umumnya relatif kecil.

- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Karakteristik PKL dapat dibedakan dari segi: sarana fisik, pola penyebaran dan pola pengelolaan. Sarana fisik pedagang PKL seperti kota-kota di Asia Tenggara mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan mudah untuk dipindah-pindahkan atau dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang dijual. Sarana fisik PKL diklasifikasikan lagi menjadi jenis barang dagangan dan jenis sarana usaha. Jenis dagangan yang dijual oleh PKL secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (Unprocessed and semiprocessed foods). Termasuk jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu dapat berupa barang setengah jadi seperti beras.
- b. Makanan siap saji (*Prepared food*) termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik PKL cenderung mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka yang lainnya.
- c. Non makanan (*Non foods*) termasuk jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan. sebagai contoh tekstil sampai dengan obat-obatan.
- d. Jasa pelayanan (*Services*). Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci duplikat, pigur , reparasi jam dan lainnya. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan dan pola pengelompokannya membaaur dengan jenis lainnya.

Berdasarkan sarana fisik usaha pedagang PKL dapat di kelompokkan

menjadi.⁵⁷

- a. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Bangunan merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.
- b. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet dilengkapi dengan meja dan bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap biasanya berjualan makanan dan minuman.
- c. Gerobak, bentuk sarana berdagang ini ada dua jenis, yaitu gerobak dorong beratap sebagai pelindung untuk barang dagangan dari penaruh panas, hujan, debu serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap. Pada umumnya untuk menjajakan makanan dan minuman serta rokok.
- d. Jongkok/Meja, bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- e. Gelaran/Alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.
- f. Pikulan/Keranjang, sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling (*mobile Howkers*) atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dipindah-pindah tempat.

---

⁵⁷ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*, 13.

3. Macam-Macam Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima

Dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah diatur mengenai sanksi yaitu *pertama* mengenai sanksi pidana dan yang *kedua* sanksi administrasi antara lain;⁵⁸

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidan dalam perda ini menyebutkan bahwa “Setiap orang/masyarakat, aparat, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 29 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”.

b. Sanksi Administrasi

Adapun administrasi dapat diakrenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:

- a) Pencabutan sebagian atau seluruh izin;
- b) Teguran, peringatan atau pembatalan izin;
- c) Penyegehan tempat;
- d) Pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Umum Tentang Sanksi Pidana dalam Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*, yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak Kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman umum dan ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁹

Hukum Pidana Islam secara istilah diterjemahkan dari kata *Jinayah* yang apabila didefinisikan secara lengkap terdapat dua kata pokok, yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*. Secara etimologis fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu* yang berarti

---

⁵⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 1.

memahami ucapan secara baik, sementara itu secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi yaitu: *“Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukand dari dalil-dalil terperinci”*

Merujuk pada definisi tersebut, fiqh diibaratkan dengan ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syariah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh menyangkut ketentuan yang bersifat Syar'i, yaitu segala sesuatu yang bersala dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata amaliah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian fiqh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.⁶⁰

2. Penjatuhan Sanksi dalam Islam

Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh perbuatan manusia dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur ini, anatara lain terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Isra ayat 15 mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi tentang ketentuan bahwa hukuman akan ditimpahkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk jarimah ta'zir harus ada peraturan dan undangundang yang telah dibuat oleh penguasa.

---

⁶⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, 3.

2. Unsur Materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Diriwayatkan dalam sebuah Hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk ummat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.
3. Unsur Moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, berakal sehatm dan berikhtiar (berkebabasan berbuat)/

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang diancam pidana harus tercantum dalam nash Al-Qur'an atau Ash-Sunnah, atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶¹ Selain itu unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana seperti yang sudah disebutkan, perlu diungkapkan pula bahwa hukum Pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi (a) jarimah hudud, (b) jarimah qishas, (c) jarimah ta'zir.
- 2) Dari segi unsur niat, ada dua jarimah yaitu, (a) yang disengaja, dan (b) yang tidak disengaja.
- 3) Dari segi cara mengerjakannya, ada dua jarimah yaitu, (a) yang positif, dan (b) yang negatif.
- 4) Dari segi si korban, jarimah itu ada dua yaitu, (a) perorangan, dan (b) kelompok.
- 5) Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua yaitu, (a) yang bersifat biasa, dan (b) yang bersifat politik.⁶²

3. Tujuan Penerapan Sanksi Pidana dalam Islam

---

⁶¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Badung:Pustakan Setia, 2013, 84.

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 22.

Dalam setiap peraturan yang dibuat pastilah mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Jika meninjau dari tata aturan pada hukum positif maka, tujuan pembuatannya tidak lain adalah untuk ketentraman masyarakat itu sendiri, dengan mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali, hukum islam yang sudah diadopsi menjadi hukum positif.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil ‘alamin memberikan contoh pedoman kehidupan kepada manusia secara komprehensif, guna tercapainya kebahagiaan hidup yang sesungguhnya sesuai yang telah digariskan oleh Rabb, serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti ungkapan yang tersurat dalam Al-Qur’anul Karim Surah Al-Baqarah (2) ayat 201-202 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : “Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a : Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya”⁶³

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan 5 (lima) aspek yang mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima aspek tersebut antara lain, aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan aspek keturunan. Kelima aspek ini merupakan perkara yang sangat mendasar dalam pandangan islam bagi umat manusia. Kelima tujuan hukum islam tersebut bila dihubungkan

---

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, 10.

dengan hukum pidana maka, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Maksud dari memelihara agama adalah agar kita mempunyai kedudukan yang sangat penting di mata Allah, maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

b. Memelihara Jiwa

Maksud dari memelihara jiwa adalah agar kita menyadari betapa pentingnya jiwa ini atau hak untuk hidup bagi manusia, maka hukum Islam yang mengatur tentang larangan membutuh sesama manusia dengan penerapan hukuman *Qishas*.

c. Memelihara Akal Pikiran

Maksud dari memelihara akal pikiran adalah agar kita memahami dan menyadari pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (Khamar), karena tindakan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran manusia

d. Memelihara Keturunan

Maksud dari memelihara keturunan adalah agar kita menyadari pentingnya kesucian keturunan manusia, maka Islam mengajarkan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat berat bagi manusia yang melakukannya.

e. Memelihara Harta

Maksud dari memelihara harta adalah agar kita menyadari pentingnya jaminan atas terpeliharanya harta dan hak milik bagi kemaslahatan umat manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hukum Islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan Negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Menurut Oktoberriansyah tujuan Hukum Pidana islam yaitu:

- 1) *Al-Jaza'* (pembalasan), konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang pada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
- 2) *Al-Jazru* (pencegahan), pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- 3) *Al-Ishlah* (pemulihan/perbaikan), yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana.
- 4) *Al-Istiadah* (restoras), sebagaimana yang diungkapkan oleh kethleen day dalam artikelnya bahwa keadilan restorative (restorative) adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- 5) *Al-Takfir* (penebus dosa), yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban/hukuman di dunia saja (*al-'uqubah al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban/hukuman di akhirat (*al-'uqubah al-ukhrawiyyah*).⁶⁴

4. Macam-Macam Sanksi Pidana dalam Islam

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana criminal dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini disebut *huddud*, (b) ketentuan hukuman

---

⁶⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Prenada Media Group, 2019, 6-7.

yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukuman public dalam ajaran islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*.

Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Ash_Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan Jarimah ta'zir, jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁶⁵

Bila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jarimah sebagai berikut :

1) Jarimah Hudud

Kata Hudud berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain, batasan aatau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasa fiqh (hukum islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqih disebut jarimah. *Jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.

Jenis-jenis *had* yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi dan salib. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang oelakunya diancam sanksi had, yaitu zina (pelechan seksual) qadzaf (tuduhan zina), sarigah (pencurian), harabah (penodongan, perampokan) khamar (minuman dan obat-obat terlarang), bughah (pemberontakan atau subversive), dan riddah/murtad (berlatih atau pidanh agama).⁶⁶

---

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 11.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana islam*, 106.

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Kata Qishas dalam hadits disebut dengan kata qawad, maksudnya adalah semisal, seumpama (al-mumatsilah). Adapun maksud yang dikehendaki syara' adalah kesamaan akibat yang ditimpahkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain, qishash adalah pelaku yang akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan qishas sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab menerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa ketika dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.⁶⁷

Sedangkan diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya mengakibatkan luka maupun tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapaun diyat dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Disamping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (qishas) yang dimaafkan atau karena sebab tertentu yang tidak dapat dilaksanakan.⁶⁸

3) Jarimah Ta'zir

Secara etimologis ta'zir berarti menolak dan mencegah. Al-Mu'jam Al-Wasuth mendefinisikan ta'zir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki

---

⁶⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 577.

⁶⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 583.

(pihak lain) tetapi bukan berupa tuduhan berzina. Berbeda dengan Qishas dan hudud bentuk sanksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Dasar hukum diisyaratkan ta'zir terdapat dalam beberapa hadits Nabi dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut, antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhamamd SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdu Dawud, Al-Tarnidzim, Al-Nasa'I dan Al-Baihaqi.⁶⁹

Ada beberapa sudut pandang mengenai jarimah ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bila ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

A. Jarimah Sengaja

Dalam jarimah ini si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan ia tau bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah di ketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi oleh tiga unsur yaitu, Unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsure pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsure ini tidak ada, maka perbuatan termasuk jarimah yang tidak sengaja.

B. Jarimah Tidak Sengaja

Dalam jarimah ini dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, namun perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.⁷⁰

- 2) Bila ditinjau dari segi cara melakukannya:

---

⁶⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 93.

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990,

Dalam aspek ini terdapat hal yang sangat menarik dan ada yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini yaitu bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah ini dilaksanakan dengan perbuatan yang terlarang ataukah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Bila ditinjau dari cara melakukannya, maka jarimah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- A. Jarimah Positif (Ijabiyah), maksudnya si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang atau dalam bahasa hukum positif yang dinamai *delict commisionis*.
- B. Jarimah Negatif (Salabiyah), maksudnya si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai dengan *delic ommisionis*, seperti tidak menolong orang lain yang membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.⁷¹

3) Bila ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya

Bila ditinjau dari cara melakukannya, maka jarimah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

A. Jarimah Perseorangan

Jarimah perseorangan adalah jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat pula.

B. Jarimah masyarakat

Jarimah masyarakat adalah sutau jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya, menurut fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringatan atau menunda dalam pelaksanaannya.⁷²

4) Bila ditinjau dari segi tabiatnya:

---

⁷¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 17.

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung:Pustaka Setika, 2000, 23.

Bila ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam yakni :

A. Jarimah Politik

Jarimah Politik, yakni jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politisi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintah yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

B. Jarimah Biasa

Jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).⁷³

---

⁷³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 25.